

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Menurut analisis yang diberikan oleh penulis tentang Fungsi Media Sosial: Studi Kasus Di Akun Instagram Kabar Kampung Kito Dalam Mengawasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Jambi, penulis dapat mencapai kesimpulan berikut:

1. Bahwasanya adanya penegasan bahwasanya fungsi media sosial dalam hal ini media sosial pada era demokratisasi saat ini adalah jelas sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Oleh karena itu kebebasan dalam aktivitas penyiaran, berekspresi, dan mengutarakan pendapat jelas dilindungi oleh hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posisi media sosial dalam kaitanya dengan kinerja Pemerintah (Pemerintah Kota Jambi) adalah sebagai salah agen kontrol sosial sekaligus juga komunikator kepada masyarakat bagi setiap kebijakan dan program pemerintah daerah Kota Jambi.
2. Bahwasanya menurut penelitian penulis, kinerja media sosial terutama media sosial akun instagram kabar kampung kito Jambi dalam rangka mengawasi kinerja aparatur pemerintah Kota Jambi telah cukup sesuai dengan indikator Fungsi Media sosial oleh Mc. Nair. Sebagian besar media sosial di Jambi telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan edukasi moral, pengetahuan, dan nilai

etika kepada masyarakat melalui konten informasinya. Dan memuat praktek penyiaran seperti menyebar luaskan hasil kinerja Pemerintah Kota Jambi baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif dengan tetap berpegang pada prinsip netralitas dan berimbang (*cover both side*), turut mengartikulasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah maupun lembaga tertentu di Kota Jambi kepada masyarakat supaya diketahui oleh warga Kota Jambi, turut menjadi fasilitator untuk mengakomodasi pendapat rakyat mengenai isu atau kebijakan tertentu yang tidak diperhatikan oleh Pemerintahan Kota Jambi (kepala daerah & DPRD), dan tentu saja turut serta memonitor kinerja mereka.

3. Menurut penelitian penulis, indikator Fungsi Media Sosial oleh Mc. Nair telah cukup sesuai untuk mengawasi kinerja aparatur pemerintah Kota Jambi. Sebagian besar media sosial di Jambi telah memenuhi tugasnya untuk memberikan edukasi moral, pengetahuan, dan nilai etika kepada masyarakat melalui kontennya. Selain itu, menggunakan metode penyiaran seperti menyebarkan hasil kinerja Pemerintah Kota Jambi, baik yang positif maupun yang negatif, dengan tetap menjaga prinsip netralitas dan keseimbangan (*cover kedua sisi*). Selain itu, memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah dan lembaga tertentu di Kota Jambi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahuinya. Selain itu, fungsi penyiaran ini juga membantu mengakomodasi pendapat rakyat

mengenai masalah atau kebijakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Media-media sosial perlu mempertahankan pola-pola pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang telah baik dan benar, seperti komitmen untuk melakukan pengawasan sesuai aturan regulasi yang berlaku dan memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah kota.
2. Media sosial harus mempertahankan praktik pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang baik dan akurat, termasuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah kota.
3. Pemerintah Kota Jambi harus terus berkomitmen untuk memfasilitasi akses informasi berita yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak masyarakat Kota Jambi untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan, terutama yang berkaitan dengan dinamika pelayanan publik dan kebijakan publik.
4. Media sosial sebagai salah satu pilar penting demokrasi harus mempertahankan independensinya. Media sosial tidak boleh

ditumpangi oleh kepentingan dari individu dan kelompok tertentu. Selain itu media sosial juga harus saling menghargai antara pihaknya dengan jajaran pemerintah daerah dengan menempatkannya sebagai mitra kerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya saling intervensi dan arogansi antar satu sama lain.